



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di [Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia](#) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Syahiruddin bin Masing, Nomor identitas 7303040510790002, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, tempat kediaman Ladang Keresa Plantation Sdn Bhd, 97008, Bintulu, Sarawak Malaysia, sebagai Pemohon I;

Hasmawati binti Cabba, Nomor identitas 7303044707790001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, tempat kediaman Ladang Keresa Plantation Sdn Bhd, 97008, Bintulu, Sarawak Malaysia, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **19 Juli 2024** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor **533/Pdt.P/2024/PA.JP** tanggal **19 Juli 2024**, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di [rumah orangtua Pemohon II di Makassar](#) pada tanggal **15 Februari 1995** dengan mahar berupa uang berjumlah **RP 13,000,000** dibayar tunai, dengan **Cabba bin Laba**, bapak kandung Pemohon II sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam masing-masing bernama **Haeruddin bin Cabba dan Syamsuddin Cabba** dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “**perjaka**”, dan Pemohon II berstatus “**perawan**”;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri **dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SAHRA RAHAYU ARJUNA**;

3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- a. Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sangat jauh dari kantor Perwakilan RI **Kuching Malaysia** dan tidak tersedianya alat transportasi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang;
- b. Adanya peraturan perusahaan ditempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja yang tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan;
- c. Para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen Keimigrasian atau kependudukan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundangan-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kepentingan:

Hal 2 dari 6 hal. Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak Pemohon I dan Pemohon II di Kuching Negara Malaysia;
 - c. Untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan: Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami, selain Pemohon I atau Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Syahiruddin bin Masing**) dengan Pemohon II (**Hasmawati binti Cabba**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkara ini;

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan II telah dipanggil sesuai menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pengelolaan PNBPN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal 4 dari 6 hal. Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu);;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rona Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Dra. Nurhayati, M.H

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Rona Handayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. PNBP panggilan pertama Pemohon I	Rp.	10.000,-
4. PNBP panggilan pertama Pemohon II	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 hal. Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)